



# **Tata Kelola dan Manajemen Risiko**



# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Tata Kelola

### ✓ Penerapan Tata Kelola

Sebagai Lembaga keuangan kepercayaan, BPRS Artha Madani memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam operasional dan pengelolaan BPRS. Hal ini merupakan faktor sangat penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat dan pemegang saham. Tata Kelola yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, dalam mengelola bank dan terus berupaya meningkatkan, konsisten dan berkelanjutan dalam implementasi dari prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS Artha Madani telah melakukan Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 dengan nilai Komposit 1,1 atau berada di peringkat 1.

Selain itu juga bank telah menyelesaikan seluruh rencana tindak untuk memenuhi pemenuhan prinsip tata kelola yang baik berdasarkan ketentuan tersebut yaitu penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern, ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi yang memadai. Hal-hal lain akan dipenuhi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan:

Aspek Tata Kelola	Time Line	Tindak Lanjut
Penunjukan Direksi membawahi fungsi kepatuhan	Juni 2021	Sudah ditetapkan Direksi Operasional membawahi fungsi Kepatuhan
Pejabat eksekutif bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko	Mei 2018	Sudah ditetapkan PE Manajemen Risiko
Pejabat eksekutif bertanggung jawab terhadap fungsi kepatuhan	Mei 2018	Sudah ditetapkan PE Kepatuhan

# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Tata Kelola

### ✓ Penerapan Tata Kelola

Aspek Tata Kelola	Time Line	Tindak Lanjut
Pedoman dan tata tertib kerja Direksi	Juli 2021	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2021
Pedoman dan tata tertib kerja Komisaris	Desember 2019	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2019
Kebijakan Remunerasi Karyawan	18 Maret 2019	Telah selesai disusun dan disahkan pada tahun 2019
Kebijakan Remunerasi Direksi	Juni 2022	Telah selesai disusun dan disahkan pada bulan Juni 2022
Kebijakan Remunerasi Komisaris	Juni 2022	Telah selesai disusun dan disahkan pada bulan Juni 2022

### ✓ Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi adalah hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara sesama direksi, komisaris, pengawas syariah, antara anggota dewan direksi dengan anggota dewan komisaris, dan antara anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan pemegang saham.

Hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi dan pemegang saham dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Afiliasi			
		Dekom	DPS	Direksi	Pemegang Saham
<b>Rendy Permana</b>	Komisaris Utama	X	X	X	V
<b>Tatang Hidayat</b>	Komisaris	X	X	X	X
<b>Syamsul Falah</b>	Pengawas Syariah	X	X	X	X
<b>Ahmad Nuryadi Asmawi</b>	Pengawas Syariah	X	X	X	X
<b>Cahyo Kartiko</b>	Direktur Utama	X	X	X	X
<b>Tian Purnama Pajar</b>	Direktur Operasional	X	X	X	X
<b>Diana Fitriani</b>	Direktur Bisnis	X	X	X	X

# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Tata Kelola

### ✓ Kepemilikan Saham Direksi, Komisaris & Dewan Pengawas Syariah

Sejalan dengan aspek keterbukaan, kepemilikan saham Direksi, Komisaris dan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Artha Madani per 31 Desember 2022 diungkapkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Rp. Kepemilikan	% Kepemilikan
<b>Rendy Permana</b>	Komisaris Utama	16.956	Rp. 1.695.600.000	11,30%
<b>Tatang Hidayat</b>	Komisaris	-	-	
<b>Syamsul Falah</b>	Pengawas Syariah	-	-	
<b>Ahmad Nuryadi Asmawi</b>	Pengawas Syariah	-	-	
<b>Cahyo Kartiko</b>	Direktur Utama	2.939	Rp. 293.900.000	1,96%
<b>Tian Purnama Pajar</b>	Direktur Operasional	-	-	
<b>Diana Fitriani</b>	Direktur Bisnis	-	-	

### ✓ Paket Remunerasi Dan Fasilitas Bagi Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS PT BPRS Artha Madani telah ditetapkan pada bulan Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Kebijakan remunerasi ini terdiri dari yang bersifat tetap dan variable. Jumlah remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diterima selama satu tahun pada 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
<b>Remunerasi:</b>						
<b>Gaji</b>	3	1.411.532.544	2	950.742.276	2	403.792.944
<b>Tunjangan</b>	3	484.516.408	2	281.567.554	2	38.089.650
<b>Tantiem</b>	3	0	2	0	2	0
<b>Bonus</b>	3	189.851.482	2	108.504.753	2	33.649.412
<b>Kompensasi Berbasis Saham</b>	3	0	2	0	2	0
<b>Remunerasi-Lainnya</b>	3	0	2	0	2	0
<b>Total Remunerasi</b>		<b>2.085.900.434</b>		<b>1.340.814.583</b>		<b>475.532.006</b>

# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Tata Kelola

### ✓ Paket Remunerasi Dan Fasilitas Bagi Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
<b>Fasilitas Lain:</b>						
<b>Perumahan</b>	3	0	2	0	2	0
<b>Transportasi</b>	3	88.064.649	2	0	2	0
<b>Kesehatan</b>	3	43.055.537	2	14.400.000	2	14.400.000
<b>Fasilitas Lain-Lainnya</b>	3	149.939.851	2	148.070.720	2	44.112.260
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>281.060.037</b>		<b>162.470.720</b>		<b>58.512.260</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>2.366.960.471</b>		<b>1.503.285.303</b>		<b>534.044.266</b>

### ✓ Rasio Gaji Tertinggi & Terendah

Rasio gaji	Perbandingan
<b>Rasio gaji Direksi tertinggi : terendah</b>	1.71
<b>Rasio gaji Komisaris tertinggi : terendah</b>	1.51
<b>Rasio gaji DPS tertinggi : terendah</b>	1.36
<b>Rasio gaji Karyawan tertinggi : terendah</b>	3.65
<b>Rasio gaji Direksi tertinggi : Komisaris tertinggi</b>	0.88
<b>Rasio gaji Direksi tertinggi : Karyawan tertinggi</b>	0.32

# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Tata Kelola

### ✓ Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan empat rapat Dewan Komisaris sebagai upaya pengawasan dengan topik pembahasan meliputi kinerja keuangan, implementasi rencana kerja, pengelolaan risiko dan isu-isu penting lainnya yang mempengaruhi jalannya perusahaan.

Tgl Rapat	Agenda Rapat	Online/ Offline	Kehadiran Dewan komisaris
20230308	a. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan IV Tahun 202. b. Kebijakan Penerapan APU PPT. c. Evaluasi Maintenance Pembiayaan PPRS setiap Cabang d. Perkembangan Pembiayaan Relaksasi	Offline	Lengkap
20230510	a. Review Notulensi Rapat sebelumnya. b. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2023. c. Evaluasi Program SDI (Rekrutmen, Kontrak Kerja, Pendidikan dan Pelatihan Karyawan). d. Review Perkembangan Proses Legalitas PPRS	Offline	Lengkap
20230712	a. Review Notulensi Rapat sebelumnya b. Review Proses Legalitas Dan Kendala PPRS c. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 d. Review Bagian Operasional e. Review Hasil Audit Internal	Offline	Lengkap
20231011	a. Review Notulensi Rapat sebelumnya b. Review Bagian Operasional c. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2023 d. Review Legalitas dan Kendala PPRS	Offline	Lengkap

# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Tata Kelola

### ✓ Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selain melakukan pemeriksaan secara uji petik, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan empat rapat Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan opini Dewan Pengawas Syariah atas permasalahan yang diajukan Direksi.

Tgl Rapat	Agenda Rapat	Online/ Offline	Kehadiran Dewan komisaris
20230224	a. Pembahasan dan permintaan opini syariah mengenai Konversi Akad Murabahah. b. Pembahasan mengenai spesial nisbah bagi hasil deposito. c. Pembahasan dan Permintaan opini syariah terkait Zakat Penghasilan Karyawan	Offline	Lengkap
20230529	Uji petik dokumen nasabah pembiayaan, tabungan dan deposito	Offline	Lengkap
20230627	Pembahasan dan permintaan opini syariah terkait pengalihan pembiayaan PPRS	Offline	Lengkap
20230718	Pembahasan mengenai pembatalan pembiayaan PPRS	Offline	Lengkap
20230824	Pembahasan dan permintaan opini produk baru yakni Tabungan berjangka Madani Vaganza	Offline	Lengkap

# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Manajemen Risiko

### ✓ Kebijakan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting mengingat aktivitas BPRS Artha Madani sebagai Lembaga intermediasi memiliki risiko yang sangat besar. Kebijakan Manajemen Risiko BPRS Artha Madani yang akan disusun mengatur terkait:

- Ruang lingkup dan tujuan manajemen risiko;
- Klasifikasi dan definisi risiko;
- Model bisnis dan toleransi terhadap risiko;
- Organisasi manajemen risiko;
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing organ pada organisasi manajemen risiko;
- Peran audit internal

Secara spesifik BPRS Artha Madani juga akan menetapkan kebijakan risiko likuiditas yang dituangkan yang didalamnya mengatur terkait:

- Organisasi pengelolaan risiko likuiditas
- Pengukuran likuiditas
- Kebijakan pengelolaan kebutuhan dana
- Kebijakan pengelolaan penempatan dana

BPRS Artha Madani telah menyusun kebijakan pembiayaan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko operasional yang akan disahkan pada bulan Juni 2022 yang disetujui oleh Komisaris Utama dan telah dilaporkan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### ✓ Organisasi & Tata Kelola Manajemen Risiko

Berdasarkan POJK mengenai Manajemen Risiko dan Tata Kelola, BPRS Artha Madani termasuk dalam kategori BPRS dengan Modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bank telah memiliki struktur organisasi yang lengkap sesuai ketentuan yaitu terdiri dari:

1. Direksi:
  - Direktur Utama
  - Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan
  - Direktur Bisnis



# Tata Kelola dan Manajemen Risiko

## Manajemen Risiko

### Organisasi & Tata Kelola Manajemen Risiko

2. Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama
  - Komisaris
3. 2 Anggota Dewan Pengawas Syariah
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
5. Pejabat Eksekutif Audit Internal

Dalam hal ini pelaksanaan pelaporan dan koordinasi terkait hal yang berhubungan dengan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pejabat Eksekutif terkait bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional yang membawahkan fungsi Kepatuhan terkait.

### Pelaporan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan POJK No. 23/POJK.03/2018 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS, maka dalam penerapannya telah melakukan:

1. Laporan Profil Risiko Semester I dan Semester II tahun 2023 atas 4 Risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) pada bulan Juli 2023 dan Januari 2024.

Adapun laporan profil risiko pada Semester II Tahun 2023 sebagai berikut:

Jenis Risiko	Penilaian Risiko Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya	
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	1	2	2	1	2
Risiko Operasional	1	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	1	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Stratejik	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			2			2